



RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2023



PEMERINTAH KECAMATAN GEROKGAK

KABUPATEN BULELENG

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang MahaEsa / Ida Sang Hyang Widhi Waça karena berkat Asung Kertha Wara Nugraha-Nya, Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Gerokgak Tahun 2023 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Gerokgak Tahun 2023 merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023. Sesuai dengan amanat Undang-Undang tersebut diatas Rencana Kerja (RENJA) Perubahan sementara ini disusun dengan masih mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Gerokgak Tahun 2023 – 2026.

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Gerokgak ini dapat kami susun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Gerokgak Tahun 2023.

Gerokgak, 30 Oktober 2023

Plt. Camat Gerokgak,



Drs. Nyoman Widiartha

Pembina Tk.I (IV/b)

Nip. 19720113 199101 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR
TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2023

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
2.1 Landasan Hukum	2
3.1 Maksud dan Tujuan	4
4.1 Sistematika Penulisan	5
BAB II	6
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN	6
BAB III	12
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	12
BAB IV	22
PENUTUP	22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perubahan 2023 Kecamatan Gerokgak yang selanjutnya disebut RENJA Perubahan adalah dokumen perencanaan pembangunan Kecamatan Gerokgak, dan pelaksanaan tugas pelayanan publik sebagai tindak lanjut dari perumusan kebijakan strategis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, menetapkan program dan kegiatan untuk mewujudkan bentuk dan sifat pelayanan SKPD yang dicapai pada masa satu tahun. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2023 Kecamatan Gerokgak dilandasi oleh semangat Otonomi Daerah dimana Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah menurut azas Otonomi dan Tugas Pembantuan, hal ini diperkuat dengan pernyataan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 ayat 1, Pemberian Kewenangan Kepala Daerah kepada Camat, dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dengan adanya kewenangan diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan daya saing melalui prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam pembangunan serta meningkatkan daya guna potensi Kecamatan dan keanekaragaman sumberdaya manusia.

Dalam melaksanakan kewenangan dengan memperhatikan keterkaitan antara Perencanaan Daerah dengan Perencanaan Kecamatan, maka perencanaan tujuan Kecamatan mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga tujuan maupun sasaran pembangunan yang ingin dicapai Pemerintah Kecamatan bersinergi dengan tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah. Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2023 Kecamatan Gerokgak memuat usulan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gerokgak serta kerangka pendanaan daerah, Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2023 SKPD Kecamatan Gerokgak secara substansial sesuai dengan Visi, Misi, agenda SKPD dan rencana resmi daerah (RKPD, RPJMD dan Renstra SKPD) dengan Renja K / L dan Renja Provinsi / Kabupaten serta

tindaklanjutnya dengan proses Penyusunan RAPBD, sesuai dengan amanat Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004, Perencanaan Pembangunan harus mencakup 5 (lima) pendekatan yaitu :

1. Pendekatan politk, dimana dengan adanya pemilihan Kepala Daerah secara langsung, maka program – program yang ditawarkan oleh kadindat Kepala Daerah pada saat melakukan melakukan kampanye harus dianggap sebagai proses perencanaan pembangunan.
2. Pendekatan teknokratik dimana perencanaan pembangunan harus menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah
3. Pendekatan partisipatif yang masyarakat bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan harus melibatkan masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan (Stake holder) terhadap pembangunan.
4. Pendekatan Top – Down (Atas – Bawah) yaitu bahwa penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan program – program jenjang pemerintah diatasnya.
5. Pendekatan Button – Up (Bawah – Atas) yaitu penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan Stake holder atau jenjang pemerintah dibawahnya, hasil proses penyusunan rencana pembangunan,Top Down dan Button – Up diselaraskan melalui musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2023, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Misi Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 – 2026. Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2023 Kecamatan Gerokgak disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD, mengacu kepada Rancangan RKPD Kabupaten Buleleng Tahun 2023, Renstra SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan triwulan II tahun berkenan sebelumnya.

2.1 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2023 Kecamatan Gerokgak adalah :

1. Landasan Idiil : Pancasila
2. Landasan Konstitusionil : UUD 1945

3. Landasan Operasional :

- a) Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- d) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- e) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- f) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- g) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- h) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- j) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- k) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka Panjang Daerah dan rencana kerja Pemerintahan
- l) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
- m) Peraturan Bupati Buleleng Nomor 77 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng

3.1 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2023 Kecamatan Gerokgak dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan acuan Kecamatan Gerokgak dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang mengacu pada RKPD Kabupaten Buleleng Tahun 2023 dan berpedoman pada Draft Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Gerokgak Tahun 2023-2026. Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2023 Kecamatan Gerokgak merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Gerokgak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2023.

Berpijak pada maksud tersebut, maka tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2023 Kecamatan Gerokgak adalah sebagai berikut :

1. Sebagai acuan Kecamatan Gerokgak dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Buleleng Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gerokgak dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Buleleng;
2. Menetapkan program dan kegiatan Kecamatan Gerokgak tahun 2023;

3. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Gerokgak Tahun 2023;
4. Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana program dan kegiatan Kecamatan Gerokgak Tahun 2023.

4.1 Sistematika Penulisan

Renja Perubahan Perangkat Daerah Kecamatan Gerokgak Tahun 2023, disusun berdasarkan tata urutan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

2.1. Landasan Hukum

3.1. Maksud dan Tujuan

4.1. Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkanaan

Bab III Rencana Kerja Perangkat Daerah

Bab V Penutup

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2023 Kecamatan Gerokgak merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah/PD untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Gerokgak. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2023 Kecamatan Gerokgak ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Gerokgak selama tahun berjalan 2023.

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Gerokgak 2023 Triwulan II telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2023 ada dilaksanakan dan ada beberapa yang tidak dapat dilaksanakan, dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

LAPORAN CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

KODE BIDANG URUSAN : 7.01 KECAMATAN
 UNIT ORGANISASI : 7.01.0.00.0.00.01.0000 (KECAMATAN GEROKGAK)
 LAPORAN CAPAIAN BULAN : Desember
 RKA/DPA TAHUN ANGGARAN : 2023

JUMLAH PROGRAM	5
JUMLAH KEGIATAN	10
JUMLAH SUB KEGIATAN	30

*) diisi dengan jumlah yang dilaksanakan sesuai no

KODE PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	INDIKATOR/TOLAK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA		SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)	
			ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN / VOLUME	ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN / VOLUME		ANGGARAN / KEUANGAN	OUTCOME / OUTPUT		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5) / (4) * 100	(8)	(9)	(10)	(11)	
7.01.01	1	PROG. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BULELENG	Meningkatnya Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten Buleleng	3,974,919,179.00	100.00	3,822,303,163.00	100.00	%	96.16	100.00	98.08
7.01.01.2.01	1.1	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja perangkat Daerah	Meningkatnya dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,495,750.00	100.00	1,495,750.00	15.00	%	100.00	100.00	100.00
	1.1.1	Penyusunan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,495,750.00	15.00	1,495,750.00	15.00	buku	100.00	100.00	100.00
7.01.01.2.02	1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia	3,322,278,264.00	100.00	3,223,444,268.00	100.00	%	97.03	100.00	98.51
7.01.01.2.02.01	1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	3,199,761,144.00	12.00	3,101,009,788.00	12.00	bulan	96.91	100.00	98.46
7.01.01.2.02.03	1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	122,517,120.00	12.00	122,434,480.00	12.00	bulan	99.93	100.00	99.97
7.01.01.2.06	1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	208,598,305.00	100.00	185,857,606.00	100.00	%	89.10	100.00	94.55
7.01.01.2.06.01	1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,293,400.00	12.00	3,581,235.00	12.00	bulan	83.41	100.00	91.71
7.01.01.2.06.02	1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28,707,500.00	4.00	27,187,921.00	4.00	buah	94.71	100.00	97.35
7.01.01.2.06.04	1.3.3	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik	145,977,513.00	12.00	126,282,050.00	12.00	bulan	86.51	100.00	93.25
7.01.01.2.06.05	1.2.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	8,902,492.00	25560.768	8,149,000.00	25560.768	lembar	91.54	100.00	95.77
7.01.01.2.06.06	1.2.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5,258,000.00	12.00	5,249,000.00	12.00	bulan	99.83	100.00	99.91
7.01.01.2.06.08	1.2.6	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu	11,139,400.00	12.00	11,088,400.00	12.00	laporan	99.54	100.00	99.77
7.01.01.2.06.09	1.2.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4,320,000.00	5.00	4,320,000.00	5.00	laporan	100.00	100.00	100.00
7.01.01.2.08	1.3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	367,678,660.00	100.00	349,220,533.00	100.00	%	94.98	100.00	97.49
7.01.01.2.08.01	1.3.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50,866,752.00	12.00	48,107,504.00	12.00	bulan	94.58	100.00	97.29
7.01.01.2.08.02	1.3.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	47,038,200.00	12.00	43,500,186.00	12.00	laporan	92.48	100.00	96.24
7.01.01.2.08.03	1.3.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	156,772,118.00	12.00	150,805,654.00	12.00	laporan	96.19	100.00	98.10
7.01.01.2.08.04	1.3.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	113,001,590.00	12.00	106,807,189.00	12.00	laporan	94.52	100.00	97.26

7.01.01.2.09	1.4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dibayarkan	74,868,200.00	100.00	62,285,006.00	100.00	%	83.19	100.00	91.60
7.01.01.2.09.01	1.4.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3,350,000.00	14.00	1,425,000.00	14.00	Unit	42.54	100.00	71.27
7.01.01.2.09.02	1.4.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	42,818,200.00	14.00	42,069,006.00	14.00	unit	98.25	100.00	99.13
7.01.01.2.09.06	1.4.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11,700,000.00	4.00	6,990,000.00	4.00	unit	59.74	100	79.87
7.01.01.2.09.09	1.4.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rehabilitasi gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10,000,000.00	1.00	9,300,000.00	1.00	Unit	93.00	100	96.50
7.01.01.2.09.10	1.4.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7,000,000.00	1.00	2,501,000.00	1.00	bulan	35.73	100	67.86
7.01.02	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik	148,913,844.00	100.00	147,306,300.00	100.00	%	98.92	100.00	99.46
7.01.02.2.04	2.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat yang dilaksanakan	148,913,844.00	100.00	147,306,300.00	100.00	%	98.92	100.00	99.46
7.01.02.2.04.03	2.1.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	148,913,844.00	14.00	147,306,300.00	14.00	laporan	98.92	100.00	99.46
7.01.03	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	218,575,758.00	100.00	211,563,993.00	100.00	%	96.79	100.00	98.40
7.01.03.2.01	3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilaksanakan	218,575,758.00	100.00	211,563,993.00	100.00	%	96.79	100.00	98.40
7.01.03.2.01.03	3.1.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	218,575,758.00	14.00	211,563,993.00	14.00	desa	96.79	100.00	98.40
7.01.04	4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya partisipasi dan sinergitas masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	357,972,710.00	100.00	351,824,648.00	100.00	%	98.28	100.00	99.14
7.01.04.2.01	4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	101,071,476.00	14.00	98,319,664.00	100.00	desa	97.28	100.00	98.64
7.01.04.2.01.01	4.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	101,071,476.00	14.00	98,319,664.00	14.00	desa	97.28	100.00	98.64
7.01.04.2.01	4.2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang di tindaklanjuti	256,901,234.00	14.00	253,504,984.00	100.00	desa	98.68	100.00	99.34
7.01.04.2.01.01	4.1.1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	256,901,234.00	14.00	253,504,984.00	14.00	desa	98.68	100.00	99.34
7.01.06	5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	205,110,654.00	14.00	199,151,956.00	100.00	desa	97.09	100.00	98.55

7.01.06.2.01	5.1	Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	205,110,654.00	14.00	199,151,956.00	100.00	desa	97.09	100.00	98.55
7.01.06.2.01.01	5.1.1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	581,750.00	14.00	581,750.00	14.00	desa	100.00	100.00	100.00
7.01.06.2.01.02	5.1.2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2,412,750.00	14.00	2,274,250.00	14.00	desa	94.26	100.00	97.13
7.01.06.2.01.03	5.1.3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2,720,000.00	14.00	2,720,000.00	14.00	desa	100.00	100.00	100.00
7.01.06.2.01.05	5.1.4	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	76,818,232.00	14.00	76,223,568.00	14.00	desa	99.23	100.00	99.61
7.01.06.2.01.09	5.1.5	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	19,483,250.00	14.00	18,036,700.00	14.00	desa	92.58	100.00	96.29
7.01.06.2.01.12	5.1.6	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	4,080,000.00	14.00	3,060,000.00	14.00	desa	75.00	100.00	87.50
7.01.06.2.01.17	5.1.7	Koordinasi Pendampingan Desa Di Wilayahnya	Jumlah Koordinasi Pendampingan Desa Di Wilayahnya	99,014,672.00	14.00	96,255,688.00	14.00	desa	97.21	100.00	98.61
7.01.06.2.01.18	5.1.8	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaaan di Wilayah Kecamatan								
dan seterusnya... 3. dan seterusnya.....											
JUMLAH TOTAL				4,905,492,145.00	100.00	4,732,150,060.00	100.00		96.47	100.00	98.23

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Realisasi dari program kerja tahun 2023 sampai dengan triwulan II tersebut memberikan bahan analisis terhadap beberapa program kerja yang sekiranya akan rendah realisasi pencapaian target dan anggarannya, jika dibiarkan walaupun pencapaian fisik 100% namun anggarannya tidak terserap seluruhnya. Atau kemungkinan adalah dengan anggaran yang sudah ada akan menghambat pencapaian target fisiknya. Berdasar itulah maka agar optimal dalam pencapaian target perlu diadakan penambahan anggaran dengan mengambil dari pagu anggaran program kerja lain yang sudah optimal target fisiknya. Selain itu juga mempertimbangkan adanya efisiensi anggaran dengan tidak mengurangi manfaat dan kualitas program/kegiatan yang direncanakan, maka perlu adanya pengurangan atau perampingan anggaran. Rencana program, kegiatan dan sub.kegiatan dalam perubahan pada tahun anggaran 2023 ini meliputi:

A. Kegiatan lanjutan tahun berkenan, semua program dengan jumlah 5 program, 10 Kegiatan dan 31 Sub kegiatan dengan total pagu indikatif sebesar 4.904.492.145,- yang terdiri dari :

**I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah**

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD

Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

e. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

f. Fasilitas Kunjungan Tamu

g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat

- a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- a. Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

IV. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

- a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

- a. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

V. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- a. Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
- b. Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
- c. Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
- d. Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa
- e. Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
- f. Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
- g. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
- h. Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan

Matrik rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023, sebagai berikut di bawah ini :

MATRIK PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD

URUSAN		PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU	
					RKPD 2023	RKPD 2023 PERUBAHAN	RKPD 2023	RKPD 2023 PERUBAHAN
SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI					
2	3	4	5	6	7	8	9	10
UNSUR KEWILAYAHAN								
KECAMATAN							5,156,165,696	4,905,492,145
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Persentase capaian kinerja perangkat daerah			4,167,048,180	3,974,919,179
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja perangkat daerah		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah			3,000,000	1,495,750
		Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	20 dokumen	20 dokumen	3,000,000	1,495,750
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase administrasi keuangan perangkat daerah			3,515,051,815	3,322,278,264

		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	29 orang	28 orang	3,392,834,695	3,199,761,144
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	70 dokumen	70 dokumen	122,217,120	122,517,120
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah			214,482,092	208,598,305
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	9 paket	9 paket	4,295,600	4,293,400
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	6 paket	4 unit	28,707,500	28,707,500
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	154,626,400	145,977,513
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	10 paket	10 paket	8,823,192	8,902,492
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	24 dokumen	24 dokumen	4,950,000	5,258,000
		Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	15 laporan	15 laporan	8,759,400	11,139,400

		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 laporan	5 laporan	4,320,000	4,320,000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			351,396,073	367,678,660
		Penyediaan Jasa Suat Menyurat		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Suat Menyurat	5 laporan	5 laporan	50,699,808	50,866,752
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air & Listrik		Jumlah laporan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air & Listrik yang disediakan	9 laporan	9 laporan	46,655,000	47,038,200
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah laporan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	8 laporan	8 laporan	140,489,675	156,772,118
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	10 laporan	10 laporan	113,551,590	113,001,590
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			83,118,200	74,868,200
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	14 unit	14 unit	3,350,000	3,350,000

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayar pajak dan perijinannya	14 unit	14 unit	42,818,200	42,818,200
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	3 unit	3 unit	19,950,000	11,700,000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	1 unit	10,000,000	10,000,000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	1 unit	7,000,000	7,000,000
PROG. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dikecamatan			158,973,900	148,913,844
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan			158,973,900	148,913,844
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	14 Laporan	14 Laporan	158,973,900	148,913,844
PROG. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				Persentase peningkatan swadaya murni masyarakat di kecamatan			220,288,752	218,575,758

		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa			220,288,752	218,575,758
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	14 Laporan	14 Laporan	220,288,752	218,575,758
PROG. KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				Persentase penanganan trantibum di kecamatan			370,288,710	357,972,710
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Persentase hasil Koordinasi dengan instansi vertikal dan tokoh masyarakat yang ditindaklanjuti			112,026,476	101,071,476
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah laporan hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	14 Laporan	14 Laporan	112,026,476	101,071,476
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Persentase hasil Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ditindaklanjuti			258,262,234	256,901,234

		Koordinasi/Sinergi Dengan Prangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidng Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Jumlah laporan Koordinasi/Sinergi Dengan Prangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidng Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	14 Laporan	14 Laporan	258,262,234	256,901,234
PROG. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				Persentase pelaksanaan pemerintahan desa yang baik			239,566,154	205,110,654
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa			239,566,154	205,110,654
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		Jumlah dokumen yang dfasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	14 Dokumen	14 Dokumen	5,781,750	581,750
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah dokumen yang dfasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	14 Dokumen	14 Dokumen	2,677,750	2,412,750
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Jumlah dokumen difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	14 Dokumen	14 Dokumen	3,095,000	2,720,000

		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	14 Dokumen	14 Dokumen	86,318,232	76,818,232
		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		Jumlah dokumen Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	14 Dokumen	14 Dokumen	33,873,250	19,483,250
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	14 Dokumen	14 Dokumen	4,080,000	4,080,000
		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		Jumlah hasil laporan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	14 Laporan	14 Laporan	99,558,672	99,014,672
		Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan		Jumlah laporan hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	14 Laporan	14 Laporan	4,181,500	-

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Gerokgak Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Gerokgak Tahun 2023-2026 yang mengacu pada **VISI** Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 **“Buleleng Kerta Raharja Mengantarkan Bali Dwipa Jaya Berlandaskan Tri Hita Kirana”** dan mengacu pada evaluasi RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Gerokgak yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat Kecamatan Gerokgak. Renja sebagai pedoman bagi pemerintah Kecamatan Gerokgak di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1.1 Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan dan ketiadaan dana sesuai kebutuhan. Pelaksanaan semua program dan kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng.
- 1.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :
 - a. Kecamatan Gerokgak berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Gerokgak Tahun 2023 serta diselaraskan dengan RKPD Kabupaten Buleleng Tahun 2023.
 - b. Kecamatan Gerokgak berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Gerokgak Tahun 2023 dengan

berpedoman kepada Renja Kecamatan Gerokgak Tahun 2023 dan RKPД Kabupaten Buleleng Tahun 2023.

- c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Kecamatan Gerokgak Tahun 2023, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2023.

1.3 Rencana Tindak Lanjut.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Gerokgak selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun 2023 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Gerokgak. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Kecamatan Gerokgak Tahun 2023 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan / pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Disamping itu Renja Perubahan Kecamatan Gerokgak juga memberikan umpan balik (feed back) dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh pimpinan sehingga diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik. Semoga keberadaan Renja Perubahan Kecamatan Gerokgak ini dapat menjadi acuan rencana pembangunan serta memberikan manfaat bagi proses perencanaan pembangunan Kabupaten Buleleng.

Gerokgak, 30 Oktober 2023

Plt. Camat Gerokgak,



Drs. Nyoman Widiartha

Pembina Tk.I (IV/b)

Nip. 19720113 199101 1 001